

PEMKOT AMBON SELESAI SUSUN RKPD 2020

Penyusunan RKPD



<http://jdih.rembangkab.go.id>

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon menggelar Rapat Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dipusatkan di Ruang Rapat Lantai II Balai Kota Ambon, Selasa (5/3).

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon. A.G Latuheru menjelaskan, saat ini Pemkot Ambon telah melalui beberapa tahapan penyusunan RKPD Tahun 2020, yaitu uji publik rancangan awal RKPD, penyampaian surat edaran walikota untuk penyempurnaan rancangan awal dan penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, dan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Awal RKPD. “Tahapan-tahapan ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan mensinergikan kebutuhan pembangunan antar komponen masyarakat, termasuk dari desa/negeri, kelurahan dan kecamatan,” ujar walikota.

Memang disadari, bahwa harapan dan tuntutan kebutuhan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat adalah sangat kompleks. Untuk itu diperlukan integritas dan sinergitas perencanaan pembangunan antar berbagai kebutuhan masyarakat dengan rencana kerja (Renja) perangkat daerah. Sejalan dengan itu, prioritas pembangunan kota dalam Rancangan Awal RKPD, memberikan arah untuk integritas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. “Selain itu, dalam upaya integritas perencanaan pembangunan daerah kota, forum ini juga akan bangun kesepahaman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020,” tuturnya.

Sekot Ambon juga menyatakan bahwa, Bappeda juga akan mengkoordinasikan integritas Renja terhadap usulan program kegiatan ditahun 2020 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau non Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk diintegritaskan yakni, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, dan kajian hidup strategis untuk mewujudkan sasaran daerah kota layak anak serta kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Tahun

2018-2025. “Saya berharap seluruh perangkat daerah yang mengikuti forum ini dapat sesegera mungkin menyelesaikan renja,” pinta walikota.

Sumber berita:

Harian Siwalima, “Pemkot Selesai Susun RKPD 2020”, 06 Maret 2019.

Catatan:

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan harus menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).
3. RKPD memuat: 1). rancangan kerangka ekonomi daerah, 2). program prioritas pembangunan daerah, dan 3). rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju.
4. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah merupakan dokumen rencana kerja satu tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.